

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak deklarasi Integrasi di Balibo pada 30 November 1975, Indonesia menganggap Timor Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah yang dikenal dengan Timor Lorosae ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1976 ditetapkan sebagai propinsi ke-27 (Departemen Luar Negeri RI, 1982: 47-49). Bahkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) lebih memperkuatnya dengan mengukuhkan status daerah tersebut melalui Ketetapan No. VI/MPR/1978 (Habibie, 2006: 231). Dengan demikian status Timor Timur sama kedudukannya dengan provinsi-provinsi lain dalam NKRI.

Pemerintah Indonesia menganggap integrasi Timor Timur bersifat "final," namun di forum internasional masalah Timor Timur masih tercantum dalam agenda PBB, sehingga upaya diplomasi Indonesia selama 23 tahun terakhir sangat dibebani dengan upaya untuk menghapuskan "Masalah Timor Timur" sebagai salah satu mata acara dalam agenda PBB. Sejak tahun 1983 upaya tersebut dilakukan melalui Dialog Segitiga antara Indonesia, PBB dan Portugal sebagai Negara yang menduduki Timor Timur sebelum Indonesia (Alatas, 2006: xvii).

Di bawah naungan Sekjen PBB Perez de Cuellar sebenarnya telah dicapai dua kali kesepakatan mengenai suatu paket penyelesaian yaitu pada tahun 1986, dimana

PBB akan membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa anggota PBB untuk meninjau situasi Timor Timur (Alatas, 2006: 42-43). Kesepakatan yang lain ialah kunjungan suatu delegasi parlemen Portugal pada tahun 1991, untuk melihat situasi di Timor Timur dan melaporkan hasil pantauannya kepada parlemen Portugal (Alatas, 2006: 51). Namun, kedua prakarsa yang telah dipersiapkan secara matang tersebut dibatalkan secara sepihak pada saat-saat akhir pelaksanaannya oleh pihak Portugal.

Hal ini memicu suatu peristiwa yang kemudian disebut dengan insiden Santa Cruz tanggal 12 November 1991 (Alatas, 2006: 57). Sepertinya ada upaya sistematis dengan keributan ini untuk mendapat perhatian dunia internasional. Insiden tersebut berakibat mencuatnya kembali masalah Timor Timur menjadi fokus masyarakat internasional, setelah selama beberapa tahun sebelum terjadinya insiden tersebut berhasil diredam. Isu Timor Timur kemudian berkembang menjadi masalah HAM, demokratisasi dan masalah-masalah lain yang tidak langsung terkait dengan dekolonisasi. Oleh karena itu, sekalipun perbincangan mengenai dekolonisasi Timor Timur pada badan internasional tersebut cenderung menyusut, sebaliknya perbincangan mengenai isu pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Timur semakin mencuat.

Geoffrey Robinson (2003:16) menegaskan dalam laporannya bahwa:

Kejadian-kejadian di Timor Timur dan pergeseran konteks internasional secara bertahap mulai memperlemah posisi Indonesia sepanjang dasawarsa 1990-an. Kejadian yang merupakan titik balik adalah pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991, dimana sebanyak 270 orang ditembak atau dipukuli sampai mati oleh tentara Indonesia. Rekaman video yang mengejutkan mengenai pembantaian itu disiarkan ke seluruh dunia, memicu kemarahan dan

mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok pendukung Timor Timur di seluruh dunia.

Insiden tersebut dan berbagai aspek perkembangan selanjutnya telah memberikan semangat baru kepada lawan-lawan Indonesia untuk mempersoalkan kembali apa yang mereka yakini sebagai akar persoalannya, yaitu hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Penangkapan pemimpin perlawanan Xanana Gusmao pada akhir 1992, pengadilan politik terhadapnya setahun kemudian, dan perjuangannya selama di penjara semakin meningkatkan perlawanan. Perkembangan penting lain adalah saat juru bicara internasional Jose Ramos Horta dan Uskup Dili, Monsignor Carlos Belo mendapat Anugrah Nobel pada tahun 1996. Penganugerahan ini kemudian meningkatkan kelompok pendukung Timor Timur dan prospek penyelesaian selanjutnya meningkat pada tahun 1997 ketika Kofi Annan menjadi Sekretaris Jendral PBB (Robinson, 2003: 16).

Perubahan penting terjadi pada tahun 1998 ketika Soeharto mundur dari kekuasaannya. Sesuai dengan pasal 8 UUD 1945, jabatan Presiden diserahkan kepada wakil Presiden yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden 1998-2003 (Habibie, 2006: 65-66). Sebagai Presiden pengganti Soeharto, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh berbeda dari pendahulunya.

Tak sampai sebulan setelah menduduki kursi kepresidenan, Habibie membebaskan beberapa tawanan politik Timor Timur dan menjanjikan suatu status istimewa yang luas untuk wilayah tersebut. Ramos Horta dan tokoh-tokoh perjuangan lain menolak janji itu, sebab hal itu berarti menerima legalitas pendudukan Indonesia.

Belum jelas dengan status istimewa yang luas, pada bulan Januari 1999, Ali Alatas mengumumkan bahwa jika usulan otonomi untuk Timor Timur ditolak, wilayah tersebut akan diberi kemerdekaan. Habibie sendiri mengatakan bahwa paling lambat sebelum 1 Januari 2000, dia ingin isu Timor Timur ini tidak lagi mengganggu Indonesia (Ricklefs, 2008: 699-700).

Kedua opsi itu ditawarkan lewat jajak pendapat yang akan diselenggarakan dengan sistem pemilihan langsung pada 30 Agustus 1999. Sebanyak 446.953 suara masuk dan mempresentasikan 98,6 persen dari seluruh pemilih. Dari 438.968 suara yang sah, 78,5 persen menginginkan kemerdekaan, dan 21,5 persen sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup NKRI (Ricklefs, 2008: 702). Artinya, sebagian besar rakyat Timor Timur menyatakan ingin memisahkan diri dari Indonesia yang selanjutnya dijadikan landasan untuk melepaskan Timor Timur.

Mencuatnya permasalahan tersebut berawal dari media massa luar negeri yang berhasil merekam peristiwa Santa Cruz 1991. Pertanyaan yang penting untuk dikemukakan adalah bagaimana dengan media massa dalam negeri? Bagaimana pula media massa dalam negeri memberitakan dan berpandangan tentang dinamika yang terjadi di Timor Timur? Pers, sebagai media informasi, merupakan kekuatan yang mempengaruhi masyarakat sekaligus merubah perilaku masyarakat tersebut. Pers selalu menyajikan informasi yang terbaru (aktualitas) bagi para pembacanya. Di samping itu, selain karena unsur keaktualitasan, informasi itu mengandung dan menyebarkan gagasan-gagasan atau opini-opini yang juga dianggap baru dan relevan dengan kondisi masyarakat di mana pers itu menyebar (Muhtadi, 1999: 44-45).

Perlu kita ingat bahwa pada masa Orde Baru media massa atau pers tidak leluasa dalam memberitakan suatu peristiwa kepada masyarakat. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru pers Indonesia disebut Pers Pancasila dengan cirinya adalah bebas dan bertanggung jawab. Akan tetapi, penafsirannya seringkali bersifat normatif-subjektif dan merupakan pembenaran bagi mekanisme kekuasaan yang dominan dalam masyarakat yaitu pemerintah (Mallarangeng, 2010: 3-5). Akibatnya, kebebasan yang dijanjikan tidak ada, bahkan yang ada hanyalah tindakan pembredelan.

Kesertaan pers dalam kehidupan politik berfungsi sebagai sumber informasi politik, partisipasi politik, dan integrasi mengembangkan budaya politik. Kegiatan pers yang menyangkut tentang politik dapat menggunakan tiga macam rubrik yaitu: news item, editorial dan advertising. Maka pada setiap peristiwa politik, perhatian terhadap media massa semakin meningkat. Selain itu, media massa juga merupakan alat komunikasi politik berdimensi dua, yaitu sebagai alat mentransformasikan kebijakan politik dan sebagai sarana kontrol sosial.

Mengenai fungsi pers sebagai sumber informasi, pers berupaya untuk menceritakan sebuah peristiwa, keadaan atau benda melalui simbol-simbol (baik verbal maupun nonverbal) yang sering kali disebut sebagai rekonstruksi realitas. Akan tetapi, bukan hanya itu, pers juga menciptakan makna bagi para pembacanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Deddy Mulyana dalam Eriyanto (2002: xii) mengatakan bahwa konstruksi makna dan realitas sebenarnya merupakan laporan

peristiwa yang diklaim objektif oleh media itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologis surat kabar tersebut. Hal ini akan mencakup masalah siapa, kepentingan apa dan perspektif mana yang akan memperoleh akses pada media itu.

Tulisan ini memfokuskan kajiannya pada pandangan-pandangan yang diberikan oleh surat kabar *Kompas* dan *Republika* terhadap permasalahan dinamika politik di Timor Timur pada tahun 1993 sampai 1999. Adapun alasan pemilihan surat kabar *Kompas* ialah pertama, *Kompas* sejak puluhan tahun adalah harian nasional dengan tiras tertinggi di Indonesia, meski pada awal perkembangannya, tahun 1960-1970, *Kompas* merupakan harian minoritas Katolik yang tumbuh di tengah-tengah lautan umat Islam dan surat kabar lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Kedua, *Kompas* termasuk surat kabar yang terbuka, independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Ketiga, *Kompas* selama masa tiga puluh tahun rezim Soeharto membuktikan diri sebagai media yang mampu menyesuaikan diri dan secara ekonomi telah memetik keuntungan yang besar dari kemampuan menyesuaikan diri itu. Hal tersebut terlihat pada gaya tulisan *Kompas* yang seimbang dan hati-hati. Keempat, *Kompas* mampu menjaga hubungan baik dengan para politisi dan hubungan ini tidak terlihat nyata dalam bisnis jurnalistik sehari-hari (Keller, 2009: 45-56).

Adapun alasan pemilihan surat kabar *Republika* adalah pertama, *Republika* adalah satu-satunya surat kabar yang bernafaskan Islam, yang bertahan hidup di antara sederetan koran Islam yang terbit tahun 1990-an. *Republika* lahir sebagai perwujudan salah satu program ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Sesuai UU Pokok Pers, penerbitan pers harus berbadan usaha. Untuk itulah Yayasan

Abdi Bangsa mendirikan PT Abadi Bangsa pada 28 November 1992. sebulan kemudian, 19 Desember 1992 *Republika* memperoleh SIUPP dan mulai resmi berdiri tanggal 4 Januari 1993 (Hamad, 2004: 120). Berdirinya *Republika* sebagai corong kepentingan kaum Islam mencerminkan perkembangan politik masa itu.

Kedua, tampilnya sosok BJ. Habibie, ketua ICMI, menandai bangkitnya politisi Islam yang sampai tahun 1980-an disingkirkan oleh Soeharto. Ketiga, *Republika* sampai dengan tahun 2000 merupakan harian yang mendukung urusan agama Islam dan penganutnya, serta disponsori oleh pebisnis-pebisnis Islam yang berpengaruh (Keller, 2009: 82-84). Meskipun demikian, dengan tiras 100.000 per hari pada tahun 1993 dan 165.000 per hari pada tahun 1994, *Republika* diharapkan tampil sebagai harian umum “Dari Umat untuk Bangsa.” Jakob Oetama (2001:38-39) pun berkomentar bahwa kata umat mengacu kepada suatu pandangan, sikap dan perilaku warga masyarakat yang kepeduliannya lebih jauh dari sekedar kepentingannya sendiri. Konotasi umat tidak eksklusif karena pemahaman dan penghayatan rohnya secara Indonesia serta paham kebangsaan yang menaungi dan merupakan rumah bersama.

Mengingat masih terbatasnya khasanah penelitian sejarah dalam sudut pandang pers terutama surat kabar, maka penulis merasa tertarik untuk menulis seputar dinamika politik di Timor Timur tahun 1993-1999 dalam sudut pandang pers.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, maka penulis bermaksud mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **PANDANGAN SURAT KABAR KOMPAS DAN REPUBLIKA TERHADAP DINAMIKA POLITIK DI TIMOR**

**Nurjaman, 2012**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

TIMUR 1993-1999. Maksud yang terkandung pada judul di atas adalah tanggapan, sikap dan pendirian yang diperlihatkan oleh kedua surat kabar tersebut yang tercermin dalam tajuk rencana, catatan pojok dan karikturnya terhadap dinamika politik di Timor Timur 1993-1999.

## 1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan utama yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana surat kabar *Kompas* dan *Republika* memberikan pandangan terhadap dinamika politik di Timor Timur 1993-1999.

Untuk lebih memfokuskan kajian penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang dirumuskan ke dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana proses terjadinya Integrasi dan Dinamika Politik di Timor Timur 1993-1999?
2. Bagaimana sejarah surat kabar *Kompas* dan *Republika*?
3. Bagaimana sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* dan *Republika* dilihat dari tajuk rencana, catatan pojok, dan karikturnya dalam menyikapi isu-isu politik di Timor Timur 1993-1999 terutama mengenai peristiwa Santa Cruz, masalah HAM dan Jajak Pendapat?
4. Bagaimana pandangan surat kabar *Kompas* dan *Republika* mengenai masalah Timor Timur pasca jajak pendapat?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan sudut pandang pers khususnya surat kabar *Kompas* dan *Republika* dalam menyikapi dinamika politik di Timor Timur 1993-1999 dalam sebuah pemberitaan dan pandangan.

Adapun tujuan-tujuan khususnya antara lain:

1. Mengungkapkan mengenai proses integrasi Timor Timur 1976 dan dinamika politik pada tahun 1993-1999 berdasarkan sumber-sumber berupa buku-buku, arsip, dan surat kabar khususnya *Kompas* dan *Republika*.
2. Mengungkapkan sejarah dari surat kabar *Kompas* dan *Republika* khususnya pada tahun 1993-1999.
3. Mengungkapkan sikap dan pandangan surat kabar *Kompas* (dilihat dari tajuk rencana, catatan pojok, dan karikaturinya) dan *Republika* dalam menyikapi isu-isu politik di Timor Timur 1993-1999 khususnya mengenai peristiwa Santa Cruz, masalah HAM dan Jajak Pendapat.
4. Mengungkapkan pandangan surat kabar *Kompas* dan *Republika* mengenai masalah Timor Timur pasca jajak pendapat.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya penulisan sejarah dalam rangka mengembangkan wawasan yang berkaitan dengan sejarah Indonesia di masa transisi dalam sebuah media massa terutama dalam surat kabar.
- b. Menambah wawasan seputar Timor Timur yang masih jadi perdebatan hingga sekarang.

## 1.4 Metodologi dan Teknik Penelitian

### 1.4.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode historis. Metode historis menurut Louis Gotchlak (1986:32) adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman peninggalan masa lampau.

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian sejarah menurut Ismaun (2001: 125-131) yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain:

#### 1. Heuristik

Langkah awal dari penelitian sejarah adalah heuristik yaitu menemukan jejak-jejak atau sumber-sumber dari suatu peristiwa yang kemudian disusun menjadi sebuah kisah sejarah. Pada tahap ini penulis berusaha menghimpun sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi. Dalam penelitian ini, sumber tersebut berupa buku, surat kabar, arsip, artikel dan beberapa dokumen lainnya yang dinilai relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam

Nurjaman, 2012

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

skripsi ini. Pada tahap ini penulis berusaha untuk menemukan sumber tertulis primer berupa naskah surat kabar *Kompas* dan *Republika* yang diperoleh dari bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dari kedua media tersebut. Selain itu, penulis juga mencari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini dengan mendatangi beberapa perpustakaan, antara lain seperti Perpustakaan UPI, Perpustakaan Daerah Tingkat I Jawa Barat, Perpustakaan Museum Konferensi Asia Afrika dan Arsip Nasional Jakarta. Penulis juga mendatangi pusat penjualan buku Gramedia, Palasari dan penjualan buku bekas di jalan Dewi Sartika.

## 2. Kritik dan Analisis Sumber

Kritik sumber merupakan salah satu langkah dalam penelitian sejarah yang berisi penilaian sumber-sumber yang diperoleh. Pada tahap ini penulis berupaya melakukan penilaian dan mengkritisi sumber-sumber yang telah ditemukan. Selain itu, penulis juga melakukan klasifikasi terhadap sumber-sumber tertulis berupa naskah-naskah dari surat kabarr *Kompas* dan *Republika*, begitu juga halnya dengan buku-buku penunjang sehingga penulis mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji oleh penulis. Pada tahap ini, penulis melakukan kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentisitas dari sumber yang diperoleh. Khusus mengenai buku, penulis akan melihat sejauh mana kompetensi dari penulis buku sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Karena penulis menggunakan surat kabar sebagai sumber primer dan buku-buku penunjang sebagai sumber sekunder, maka penulis melakukan kritik intern. Menurut Sjamsuddin (2007: 111), kritik intern lebih

menekankan pada isi dari sumber sejarah. Sejarawan harus memutuskan apakah kesaksian atau data yang diperoleh dari berbagai sumber itu dapat diandalkan atau tidak. Kritik yang dilakukan oleh penulis ialah dengan cara melihat isi buku kemudian membandingkan dengan buku-buku yang lain. Jika terdapat perbedaan isi dalam sebuah buku, maka penulis melihat buku dari buku lain yang menggunakan referensi-referensi yang dapat diandalkan. Buku yang dijadikan buku utama oleh penulis antara lain Habibie, BJ. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Alatas, Ali. (2006). *The Pebble in The Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor*. Kuntari, Rien. (2008). *Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*. Nevins, Joseph. (2008). *Pembantaian Timor Timur: Horror Masyarakat Internasional*. Keller, Anett. 2009. *Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media cetak Nasional- Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika*. Oetama, Jacob. 2001. *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*.

### 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap untuk menafsirkan keterangan yang diperoleh dari sumber sejarah berupa fakta-fakta yang terkumpul dari sumber-sumber primer maupun sekunder dengan cara menghubungkan dan merangkaikannya sehingga tercipta suatu fakta sejarah yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Pada tahap interpretasi ini, penulis berusaha menemukan hubungan antara berbagai fakta mengenai dinamika politik Timor Timur dari tahun 1993 sampai 1999 dikaitkan dengan sikap pandangan dan penilaian yang diberikan oleh dua surat kabar yaitu

*Kompas* dan *Republika*. Proses interpretasi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian yang telah diajukan.

#### 4. Historiografi

Menurut Helius Sjamsuddin (2007:156), historiografi adalah suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuan berupa suatu penelitian yang utuh. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian sejarah. Pada tahap ini, penulis menyajikan hasil temuannya dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan yang menggunakan gaya dan tata bahasa sederhana serta penelitian yang baik dan benar. Tulisan tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Surat Kabar *Kompas* dan *Republika* Terhadap Dinamika Politik di Timor Timur 1993-1999.”

##### 1.4.2 Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat adalah dengan studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku yang berkenaan dengan Timor Timur khususnya pada tahun 1993-1999 dan studi dokumentasi berupa arsip-arsip dari perpustakaan dan surat kabar khususnya *Kompas* dan *Republika* dari tahun 1993 sampai 1999 (terutama pokok pikiran yang terkandung dalam tajuk rencana, catatan pojok dan karikturnya) sebagai bahan primer serta dokumen lain yang berhubungan dan mendukung permasalahan dalam penelitian ini. Setelah literatur terkumpul dan dianggap memadai untuk memulai penelitian, penulis mempelajari, mengkaji dan

mengklasifikasikan sumber-sumber yang diperoleh, lalu memisahkan sumber-sumber yang dianggap kurang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian skripsi ini tersusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu tentang dinamika politik di Timor Timur 1993-1999. Bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah penulis mengkaji dan mengarahkan pembahasan serta metode dan teknik penelitian sebagai cara untuk mendapatkan data dan fakta, dan terakhir sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dikemukakan secara singkat tentang sumber-sumber kepustakaan yang dijadikan sebagai bahan referensi dan kajian teoritis sebagai kerangka dasar berfikir bagi penulis untuk dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan Dinamika Politik di Timor Timur 1993-1999. Selain itu, dalam bab ini akan dipaparkan pula beberapa analisis yang dapat mempermudah dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu pencarian sumber, pengolahan sumber dengan menggunakan kritik eksternal dan internal, serta

**Nurjaman, 2012**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

interpretasi berupa analisis fakta-fakta yang sudah didapat dan terakhir historiografi yaitu penulisan laporan penelitian.

#### BAB IV PANDANGAN SURAT KABAR *KOMPAS* DAN *REPUBLIKA* DALAM MENYIKAPI DINAMIKA POLITIK DI TIMOR TIMUR 1993-1999.

Bab ini memuat uraian penjelasan dan analisis dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan dibahas tentang pandangan dan tanggapan dari kedua surat kabar ini terhadap dinamika politik di Timor Timur 1993-1999 yang tercermin dalam berita, tajuk rencana, catatan pojok dan beberapa karikатурnya.

#### BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil temuan dan pandangan penulis terhadap sikap dan pandangan yang diperlihatkan oleh surat kabar *Kompas* dan *Republika* dalam menanggapi Dinamika Politik di Timor Timur 1993-1999.